

## DAFTAR PUSTAKA

Ajat Sudrajat, Arles Parulian Ompusunggu. *Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak*. Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Vol. 2, No. 2, Desember 2015, hal 193 - 202 ISSN 2339 – 1545.

Ayu Ika Novitarina, S.H, 2005, *Implementasi Electronic Filing System (e-Filing) Dalam Praktik Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Di Indonesia*. Semarang.

Ananda, Pasca Rizki Dwi. 2015. “*Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UKMM yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)*”. Universitas Brawijaya, Malang. Vol.6 No.2

Boham 2015 “ *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Manado*”. Politeknik Negeri Manado.

Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

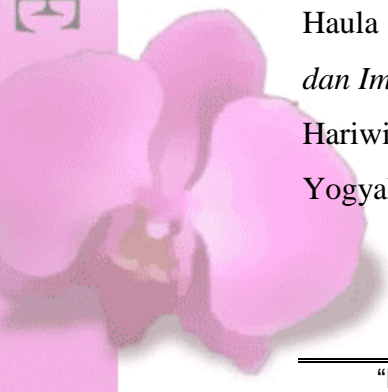
Georgios Generalis.2000. *A Methodology for Measuring Productivity and Improving Service Responsiveness in a Tax Collection Agency Dissertation*, University of Miami.

Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*.

Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Cetakan Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, (2012) *Pengantar Ilmu Pajak : Kebijakan dan Implementasi Di Indonesia*, Jakarta : Rajagrafindo Persada.

HariwijayaM. Dan Triton (2011). *Pedoman Penulisan Ilmiah Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: ORYZA.



- Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yulianawati. 2011. *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3 No. 1 . Universitas Stikubank : Semarang.
- Husein Umar. 1999. *Metode Penelitian: Aplikasi Dalam Pemasaran*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
- Julianti, Murni. 2014. *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak dengan Kondisis Keuangan dan Preferensi Resiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Modereting*. Skripsi (S1). Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Diponegoro.
- Madewig.2013 “*Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara*”. Universitas Hassanudin Makaassar.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009 .Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi 2011* .Yogyakarta: Penerbit Andi. 2011.
- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. 2011. “*Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depansar Timur*”. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Volume 2.
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik : Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Pandiangan, Liberti, 2008, *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Pekerti. Titi Cahya.2015. “*Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Pemahaman Wajib Pajak Yang Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Hotel Atas Rumah Kos Terdaftar Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)*”. Universitas Brawijaya, Malang. Vol. 7 No.1 2015.
- Pranadata, I Gede Putu. 2014. “*Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Batu*”. Universitas Brawijaya, Malang.

Prawirodidirdjo, Suharto Arto. 2007. *“Analisis Pengaruh Perubahan Organisasi dan Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan dan Kinerja Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Berbasis Administrasi Modern di Lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus”*. Tesis Magister Manajemen, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro. Tidak dipublikasi.

Rahayu, Sri. 2009. *“Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung ”X”)*. Universitas, Kristen, Maranatha.

Resmi Siti 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.

Resmi,Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta

Siahaan, Fadjar O.P. 2005. *“Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perilaku Kepatuhan Tax Professional dalam Pelaporan Pajak Badan pada Perusahaan Industri Manufaktur di Surabaya”*. Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Tidak Dipublikasikan.

Simanjuntak, Timbul Hamongan & Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi*.

Siti Kurnia Rahayu, 2010.*Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal, Yogyakarta : Graha Ilmu*.

Sugiyono, 2004, *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan keempat Alfabeta, Bandung

Sugiyono, 2006, *Statistika Untuk Penelitian*, Cetakan Ketujuh, Bandung: CV. Alfabeta.

Sugiyono, (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.

Sugiyono.(2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta

Umar Husein.1999. *Metodologi Penelitian. Aplikasi dalam Penelitian*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.

Uma Sekaran, 2006, *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*, Edisi 4, Buku 2, Jakarta: Salemba Empat.

Widodo W dan Djefris D. 2008. *TaxPayer’s Right: Apa Yang Perlu Kita Ketahui Tentang Hak – Hak Wajib Pajak*. Bandung : Alfabeta.

Winerungan, Lidya Oktaviane. 2013. *“Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Blitung”*. Jurnal EMBA Vol. 1 No 3 September 2013.

Yuliasari, Wirda Salisa. 2015. *“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pibadi (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Ponorogo)”*. Universitas Brawijaya, Malang. Vol.4 No. 2 Maret 2015.

Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-38/PJ/2013 tentang perubahan peraturan Direktur Jenderal Pajak Per-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Usaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak.

Peraturan DJP nomor 6/PJ/2009 pasal 1 mengenai Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam bentuk elektronik.

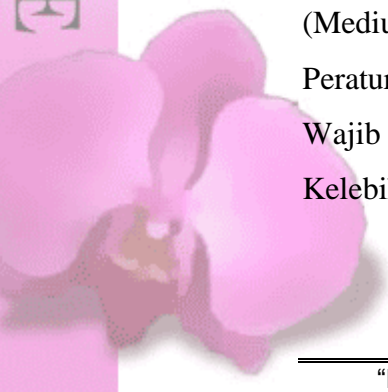
Keputusan Menteri Keuangan No. 65/KMK.01/2002 yang membentuk 2 KPP Wajib Pajak Besar (Large Taxpayers’ Office) yaitu KPP WP Besar I dan KPP WP Besar II yang berkedudukan di Jakarta.

Kepmenkeu No. 519/KMK.01/2003 jo. 587/KMK.01/2003 dibentuk 10 KPP Khusus yang juga berkedudukan di Jakarta meliputi KPP BUMN, Perusahaan PMA, WP Badan dan Orang Asing, dan Perusahaan Masuk Bursa.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik.

Kepmenkeu No 254/KMK.01.2004 dibentuk KPP untuk pembayar pajak menengah (Medium Taxpayers Office) yang kemudian disebut KPP Madya.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/KMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.



Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-1/PJ/2008 tanggal 18 Januari 2008 tentang Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dan Prosedur dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu.

Peraturan Menteri Keuangan RI No.74/PMK.03/2012 Pasal 3 Syarat-syarat menjadi wajib pajak patuh.

Peraturan Menteri Keuangan RI No.74/PMK.03/2012 Pasal 4.

Peraturan Menteri Keuangan RI No.74/PMK.03/2012 Pasal 11.

PER 06/PJ/2009 tentang cara pembetulan e-SPT.

Peraturan Direktur Pajak Nomor Kep-05/PJ/2005 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (e-Filing) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

PMK-242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Surat edaran Direkturt Jendral Pajak Nomor SE-22/PJ/2007 Tentang Penyeragaman Sosialisasi Perpajakan Bagi Masyarakat.

Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-2/PJ./2008 tentang Tata Cara

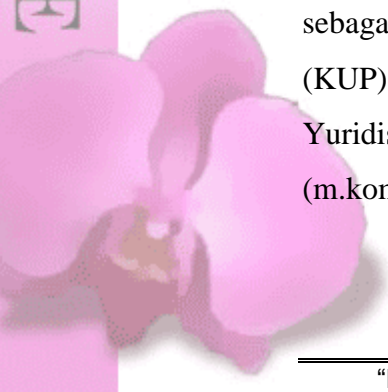
Surat Edaran Pajak No. SE98/PJ/2011 tentang Pedoman penyusunan rencana kerja dan laporan kegiatan penyuluhan perpajakan unit vertikal di lingkungan DJP

UUD 1945 pasal 23 ayat 2.

Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan, awalnya peraturan mengenai perpajakan ini diatur dalam UU No. 6 Tahun 1983 yang kemudian mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terbaru adalah UU No. 28 Tahun 2007.

Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 (KUP) pasal 1 angka 1 Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis).

(m.kompas.com/27 April 2016)



<https://www.kemenkeu.go.id/Artikel/mendongkrak-kepatuhan-penyampaian-spt>  
(diakses 31/07/2017/16.51).

<http://pajak.go.id/content/article/refleksi-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak>

<https://www.sukapajak.com/pengertian-dan-penjelasan-lengkap-tentang-kode-billing-pajak/>.

[www.ortax.org/ortax/?mod](http://www.ortax.org/ortax/?mod).

<https://www.online-pajak.com/id/modernisasi-administrasi-perpajakan-upaya-penyempurnaan-pelayanan-pajak-bagian-1-1>(diakses 10.32/18/ju/i/2017).

<http://azizkusumaaji.blogspot.co.id/2013/01/modernisasi-sistem-administrasi.html>  
(diakses 9.40/19/ juli /2017).

<http://nasional.kontan.co.id/news/laporan-spt-dan-jumlah-wajib-pajak-tumbuh-di-2017>.

<https://binarmentari.wordpress.com/2009/10/23/penyuluhan-pajak-berbasis-sosialisasi-dan-reward-untuk-meningkatkan-kesadaran-wajib-pajak/>

<http://www.pajak.go.id/content/article/menakar-kadar-kepatuhan-wajib-pajak>  
(diakses 20.30/04/08/2017).

<http://www.sadarpajak.com/2016/09/keudukan-tugas-pokok-dan-fungsi-kpp.html>  
(diakses 6.50/03/agustus/2017)

